

MENGENAL



POLITIK IDENTITAS

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), **Rahmat Bagja**, memprediksi bahwa **politik identitas akan dipakai sebagai serangan** terhadap partai politik atau kepentingan politik tertentu dalam **Pemilu 2024** mendatang.

Waduh. . .

Ada apa, *sih*, dengan **politik identitas** ini? Apakah politik identitas memang **bermakna negatif?**

Mari kita kulik lebih jauh tentang politik identitas!

Politik Identitas Diprediksi Makin Marak, Bawaslu Siapkan Strategi Pencegahan

Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 30 Juni 2022 - 12:21 WIB

Lang Pemilu 2024

Bagja



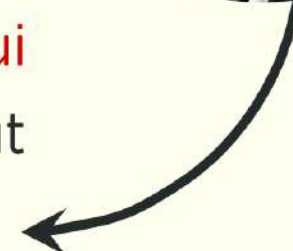
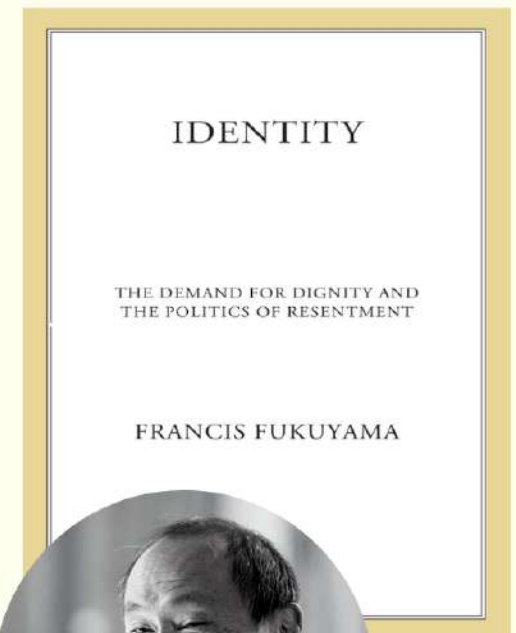
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi narasumber dalam FGD Seminar Nasional Lemhannas RI tentang Tantangan Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI

Definisi politik identitas

Sebelum masuk ke definisi politik identitas, pada dasarnya kita perlu tahu dulu, *nih*, apa itu identitas.

Seorang ilmuwan politik dari Stanford University yaitu **Francis Fukuyama (2018)** mendefinisikan **identitas** sebagai **karakteristik yang membedakan antara jati diri seseorang dengan dunia luar**. Agama, etnis, ras, gender, dan orientasi seksual merupakan beberapa contoh dari identitas.

Nah, seseorang yang memiliki identitas secara otomatis akan menuntut **pengakuan terhadap nilai (*value*) dan martabat (*dignity*)** dari orang/kelompok lain, salah satunya **melalui aktivitas politik**. Ini yang kemudian disebut Fukuyama sebagai **politik identitas**.



Politik identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia sebenarnya merupakan fenomena yang telah lama muncul, *loh*. Misalnya saja ketika terjadi pemberontakan berbasis sentimen kedaerahan di awal kemerdekaan Indonesia, seperti yang dilakukan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pada era modern, fenomena politik identitas di Indonesia dipersempit maknanya dalam kontestasi politik, *nih*. Contohnya penggunaan isu SARA antara pendukung Anies Baswedan dan Basuki T. Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies Baswedan



Basuki T. Purnama

Politik identitas di dunia

Lanjut, tidak hanya di Indonesia, politik identitas juga bisa kita lihat dari fenomena di negara lain. Kamu masih ingat Presiden Amerika Serikat (AS) sebelum Joe Biden? Yap, betul **Donald Trump!** Nah, pada tahun 2016 Trump menggunakan **narasi kebencian terhadap imigran** di AS dalam pemilu presiden. Selain itu, dengan narasi yang sama, politik identitas juga dilakukan oleh **Bolsonaro di Brazil** dan **Viktor Orbán di Hungaria** pada tahun 2018.

Donald Trump

Bolsonaro

Viktor Orbán



Tidak serta-merta negatif

Eits, tapi sebenarnya politik identitas tidak serta-merta bermakna negatif, *loh*. Wiarda (2014) menjelaskan bahwa di awal kemunculannya pada 1960-an dan 1970-an, **politik identitas digunakan sebagai basis gerakan** kelompok kulit hitam, feminis, LGBT, orang Indian (penduduk asli AS), maupun **kelompok progresif** lainnya di AS dan Eropa.

Kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok marginal yang mengalami penindasan. Karena mengalami penindasan, mereka kemudian **menjadikan aktivisme politik berbasis identitas sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka.**



Jadi, sampai sini paham, ya, kalau politik identitas bisa bermakna positif juga?

Sebagai penutup, akademisi Amy Guttman (2009) menegaskan, *nih*, bahwa pada hakikatnya politik identitas merupakan sesuatu yang baik ketika digunakan untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan persamaan hak bagi kelompok marginal. Akan tetapi, ketika politik identitas didasarkan dengan kebencian terhadap kelompok lain, maka politik identitas dapat memunculkan konflik yang bahkan dapat memakan korban jiwa.

POLITIK
IDENTITAS



REFERENSI

Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.

Gloria, R. (2022). *Politik identitas diprediksi makin marak, Bawaslu siapkan strategi pencegahan*. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/politik-identitas-diprediksi-makin-marak-bawaslu-siapkan-strategi-pencegahan> pada 8 Juli 2022.

Gutmann, A. (2009). *Identity in democracy*. Princeton University Press.

Wiarda, H. J. (2014). *Political culture, political science, and identity politics: An uneasy alliance*. Ashgate Publishing, Ltd.

Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.

FOTO:

CNN.com

Foreignpolicy.com

Foxmetronews.com

Supchina.com

Unsplash.com